

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Achmad Chulaemi, 1993, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Semarang: FH Undip.

Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

AP. Parlindungan, 1994, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Bandung : Mandar Maju.

AP. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)*, Cet. 1, Bandung, Mandar Maju.

Arie Sukanti Hutagalung. 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni.

Bachtiar Effendi. 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Cet.2. Bandung: Alumni.

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.

- Boedi Harsono. 2006, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi : Djambatan.
- Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, 1996, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- H.T. Sairchild, 1990, *Dalam Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Jakarta : Indhil-Co.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Bandung : Mandar Maju.
- Irawan Soeharto, 1999, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- J. Andi Hartanto, 2012, *Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat* Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. Plorianus SP Sangun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Cetakan ke -1, (Jakarta : Visimedia).
- Qomaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sony Keraf, 2002, *Hak Milik Pribadi*, Jakarta : Kanisius.

Subagyo P. Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Prenada Media.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana.

Urip Santoso. 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, cetakan 1, Jakarta : Total Media.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok*

Agraria, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria
Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelola

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

3. JURNAL/TESIS

Ana Silviana, 2004, *Penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia,*
Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Vo. 33.

Dian Komalia Fitri, 2011, *Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah, (Tesis Universitas
Indonesia).*

Helena, 2007, *Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaris Atau Camat Studi di Kabupaten Deli Serdang*”(Tesis Universitas Sumatera Utara).

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, 2009, Padang : Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas.

4. WEBSITE :

<http://jambiprov.go.id/index.php?letluaswil>

<http://batangharikab.bps.go.id/index.php/publikasi/64>

<http://www.mgobrolhukum.com>

Boedi Djatmiko, *Tanah Negara dan Wewenang Pemberiannya*, www.tripod.com.

5. DISKUSI DAN WAWANCARA

Subagiono, SH, Kepala Seksi Permohonan Hak Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

Khairul Anwar, SH, Mantan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Muhammad Desrizal, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Marman, Mantan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Ashar, SP, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Asnawi, Petugas Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), Kantor
Pertanahan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Busmaruddin, Kepala Desa Buluh Kasab, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten
Batanghari, Provinsi Jambi.

